

Pengaruh Opini Audit, Tipe Pemerintah Daerah, Umur Administratif, dan Kekayaan Daerah terhadap Praktik *Internet Financial Reporting* (IFR) dalam *Website* Pemerintah Daerah: Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Sumatra Tahun Anggaran 2024

Muhammad Afrian^{1*}, Nelvirita²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang

*Korespondensi: afrianlagii@gmail.com

Tanggal Masuk:

01 Agustus 2025

Tanggal Revisi:

20 Oktober 2025

Tanggal Diterima:

09 November 2025

Keywords: *Audit Opinion; Type of Local Government; Administrative Age; Regional Wealth; and Internet Financial Reporting.*

How to cite (APA 6th style)

Afrian, M., & Nelvirita. (2025). Pengaruh Opini Audit, Tipe Pemerintah Daerah, Umur Administratif, dan Kekayaan Daerah terhadap Praktik *Internet Financial Reporting* (IFR) dalam *Website* Pemerintah Daerah: Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Sumatra Tahun Anggaran 2024. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 7 (4), 1852-1867.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jea.v7i4.3513>



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstract

This study aims to examine the influence of audit opinion, type of local government, administrative age, and regional wealth on the practice of internet financial reporting (IFR) on local government websites. This is a causative research study. The population and sample consist of the financial reports of regency and city governments in Indonesia for the year 2024. The sampling technique used is purposive sampling. The type of data employed is secondary data. Data collection was conducted through documentation methods by collecting local government financial reports and reviewing each local government's official website. The data analysis method used is multiple regression analysis, with internet financial reporting as the dependent variable and audit opinion, type of local government, administrative age, and regional wealth as independent variables. The results of the study indicate that audit opinion, type of local government, and administrative age do not have a significant effect on the practice of internet financial reporting on local government websites, whereas regional wealth has a negative effect on the practice of internet financial reporting.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan komunikasi telah mengubah cara pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, termasuk dalam aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Salah satu inovasi yang berkembang dalam hal ini adalah *internet financial reporting* (IFR), yaitu praktik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet. IFR memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi keuangan daerah secara tepat waktu, sehingga meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam pengawasan pengelolaan anggaran pemerintah daerah (Putra & Syofyan, 2020).

Dorongan penerapan IFR semakin kuat dengan adanya regulasi yang secara eksplisit mewajibkan transparansi keuangan daerah, seperti Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Regulasi tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi instrumen kontrol publik karena pemerintah daerah diwajibkan membuka akses informasi keuangan secara berkala, serta-merta, dan setiap saat melalui situs Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mendagri No. 3 Tahun 2017. Dalam peraturan tersebut dijelaskan terdapat tiga jenis informasi yang harus dilaporkan oleh pemerintah daerah, yaitu informasi secara berkala (termasuk di dalamnya laporan keuangan pemerintah), serta merta dan setiap saat.

Meskipun prinsip-prinsip tersebut telah diatur secara normatif, implementasi IFR di tingkat pemerintah daerah masih menghadapi tantangan. Beberapa daerah sudah cukup maju dalam penerapan IFR dengan menyediakan laporan keuangan yang lengkap dan mudah diakses oleh masyarakat, sementara daerah lainnya masih tertinggal dalam hal kualitas dan kelengkapan informasi yang disajikan (Sutaryo & Amanu, 2020). Variasi ini mengindikasikan adanya perbedaan dalam hal kapasitas tata kelola, pemanfaatan teknologi informasi, serta budaya birokrasi di masing-masing daerah. Di sisi lain, kurangnya pengawasan publik dan minimnya insentif untuk berinovasi dalam transparansi juga turut memperlambat kemajuan penerapan IFR. Padahal, transparansi informasi keuangan publik merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan *good governance* dan mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran (Mardiasmo, 2009).

Variasi penerapan IFR tersebut sekaligus menggambarkan bahwa tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi keuangan bersifat struktural dan meluas. Data Ombudsman Republik Indonesia tahun 2022 menunjukkan bahwa tingkat keterbukaan informasi publik di pemerintah daerah masih rendah, dengan hanya 35% pemerintah daerah yang memenuhi standar transparansi informasi. Fakta ini memperlihatkan bahwa sebagian besar daerah belum optimal dalam memanfaatkan teknologi digital untuk menyediakan informasi keuangan yang mudah diakses masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa hambatan dalam pemanfaatan teknologi digital tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan lemahnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam mendorong transparansi keuangan.

Berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa rendahnya penerapan IFR dipengaruhi oleh beragam faktor, baik internal organisasi maupun eksternal, seperti regulasi dan tuntutan masyarakat. Penelitian-penelitian terdahulu juga menegaskan bahwa faktor institusional pemerintah daerah memiliki peran dominan karena berkaitan langsung dengan kapasitas pengelolaan keuangan dan tata kelola pemerintahan. Yuni & Sari (2022) menemukan bahwa belanja daerah, umur administratif, kekayaan daerah dan opini audit berpengaruh terhadap tingkat penerapan IFR. Sementara itu, Budiman & Agustin (2023) menunjukkan bahwa tipe pemerintah daerah dan karakteristik kepala daerah turut menentukan variasi keterbukaan informasi. Sofyani & Dwirama (2019) menekankan pentingnya opini audit sebagai indikator akuntabilitas yang mendorong pemerintah daerah untuk memperluas transparansi melalui IFR. Di sisi lain, Laswad *et al.* (2005) mengidentifikasi kompetensi politik, ukuran pemerintah daerah, dan kekayaan daerah sebagai faktor yang memengaruhi adopsi pelaporan berbasis internet pada sektor publik. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa penerapan IFR dipengaruhi oleh kombinasi faktor struktural, politik, dan kelembagaan yang mencerminkan kapasitas tata kelola keuangan daerah.

Berdasarkan landasan empiris tersebut, penelitian ini memfokuskan pada empat variabel yang dinilai paling merepresentasikan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam mendorong penerapan IFR, yaitu opini audit, tipe pemerintah daerah, umur administratif, dan kekayaan daerah. Keempat faktor tersebut ini secara bersama-sama menggambarkan memiliki pengaruh lebih langsung terhadap kesiapan penerapan IFR karena berkaitan erat dengan kapasitas pengelolaan keuangan, kematangan birokrasi, dan ketersediaan sumber daya untuk membangun infrastruktur teknologi informasi.

Argumentasi empiris tersebut diperkuat secara teoritis melalui teori agensi yang menjelaskan hubungan antara prinsipal (masyarakat dan pemangku kepentingan) dan agen (pemerintah daerah). Teori ini berasumsi bahwa terdapat potensi konflik kepentingan karena agen memiliki informasi yang lebih besar dibandingkan prinsipal. Dalam konteks ini, IFR dipandang sebagai mekanisme untuk mengurangi asimetri informasi melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Oleh karena itu, variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini diperkirakan memengaruhi sejauh mana pemerintah daerah berkomitmen menerapkan IFR sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik (Jensen & Meckling, 1976). Dengan demikian, dapat dijelaskan secara lebih rinci relevansi masing-masing variabel dalam mendorong penerapan IFR. Opini audit mencerminkan akuntabilitas keuangan, tipe pemerintah daerah menggambarkan tekanan institusional, umur administratif menunjukkan kematangan birokrasi, sedangkan kekayaan daerah menegaskan kapasitas fiskal. Kombinasi faktor-faktor ini secara teoritis dan empiris diyakini mampu menjelaskan variasi tingkat penerapan IFR pada pemerintah daerah.

Selain itu, faktor-faktor tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi temuan dalam berbagai penelitian terdahulu. Laswad *et al.* (2005) menemukan bahwa kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap penerapan IFR, sedangkan ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan. Penelitian Kholifah (2019) juga menunjukkan bahwa umur administratif berpengaruh positif terhadap praktik IFR, sementara opini audit dan tipe pemerintah daerah tidak memiliki hubungan yang signifikan. Sebaliknya, Sofyani & Dwirama (2019) melaporkan bahwa kekayaan daerah dan opini audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap IFR. Temuan serupa ditunjukkan oleh Yuni & Sari (2022) yang menemukan bahwa kekayaan daerah dan opini audit berpengaruh signifikan terhadap IFR, sedangkan umur administratif tidak berpengaruh. Sementara itu, Budiman & Agustin (2023) menemukan bahwa tipe pemerintah daerah justru berpengaruh negatif terhadap IFR, dan umur administratif tidak memiliki pengaruh. Hasil-hasil yang bervariasi tersebut menunjukkan adanya ketidakkonsistenan temuan dalam penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi IFR.

Ketidakkonsistenan temuan tersebut menunjukkan bahwa penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi IFR masih perlu dikaji lebih lanjut dengan mempertimbangkan kombinasi variabel yang lebih relevan. Penelitian ini merupakan remodifikasi dan pengembangan atas saran penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini mengacu pada penelitian Laswad *et al.* (2005) yang berjudul *Determinants of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities*, dengan menggunakan variabel kompetisi politik, ukuran pemerintah daerah, tingkat utang, kekayaan daerah, visibilitas pers, dan tipe pemerintah daerah. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yakni dengan mengambil variabel kekayaan daerah dan tipe pemerintah daerah serta menambahkan variabel opini audit dan umur administratif. Penambahan kedua variabel ini dimaksudkan untuk menguji ulang temuan yang belum konsisten pada penelitian sebelumnya dan memperluas model pengujian dengan mempertimbangkan aspek kualitas laporan keuangan (opini audit) serta pengalaman institusional pemerintah daerah (umur administratif) yang diduga turut memengaruhi tingkat keterbukaan informasi keuangan secara daring.

Penelitian ini berfokus pada wilayah Sumatra yang belum banyak diteliti secara spesifik terkait faktor-faktor yang memengaruhi praktik *internet financial reporting* (IFR).

Selain itu, penelitian ini menggunakan data tahun anggaran 2024, yang diharapkan dapat memberikan gambaran terbaru tentang perkembangan IFR di tengah percepatan digitalisasi pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi baru dengan data terkini. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui perkembangan keadaan terbaru terkait implementasi IFR di Pulau Sumatra.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Teori agensi merupakan salah satu pilar utama dalam akuntansi dan tata kelola organisasi modern. Konsep ini pertama kali diperkenalkan secara sistematis oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling dalam artikel klasik mereka tahun 1976 yang berjudul “*Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*”. Secara umum, teori agensi digunakan untuk menjelaskan dan mengelola hubungan antara pemilik (prinsipal) dan pengelola (agen). Kegunaan utama teori ini terletak pada kemampuannya dalam mengidentifikasi potensi masalah moral *hazard* dan asimetri informasi yang mungkin terjadi dalam relasi kontraktual tersebut..

Dalam era digital, teori agensi menjadi relevan dalam menganalisis penggunaan teknologi pelaporan keuangan, khususnya *internet financial reporting* (IFR). IFR mengacu pada penyampaian informasi keuangan melalui situs web organisasi yang dapat diakses publik. Secara teoritis, IFR dapat mengurangi biaya keagenan karena meningkatkan transparansi dan akses informasi bagi pemangku kepentingan (Mokhtar, 2017). Teori agensi juga sangat relevan diterapkan dalam konteks pemerintahan daerah. Dalam hal ini, kepala daerah dan pejabat publik bertindak sebagai agen, sementara masyarakat sebagai prinsipal. Beberapa variabel seperti opini audit dari BPK, tipe pemerintah daerah (kabupaten atau kota), umur administratif daerah, dan tingkat kekayaan daerah, memengaruhi besarnya risiko keagenan dalam pengelolaan keuangan publik (Sonbay, 2022)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah dokumen resmi yang mencerminkan posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas pemerintah daerah dalam periode tertentu. Fungsi utamanya adalah sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan anggaran serta dasar pengambilan keputusan bagi para pemangku kepentingan (Hehanussa, 2015). Di samping itu, laporan ini juga digunakan oleh masyarakat dan lembaga pengawas untuk memantau efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan keuangan daerah (Salle, 2017)

Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Aturan ini mewajibkan setiap entitas pemerintah untuk menyusun laporan keuangan berbasis akrual, yang mampu mencerminkan secara lebih akurat seluruh aktivitas ekonomi dan fiskal pemerintah (Haluti *et al.*, 2024). Sesuai dengan SAP, terdapat tujuh jenis utama laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

Internet Financial Reporting

Internet financial reporting (IFR) merupakan praktik penyajian informasi keuangan secara daring melalui media situs web. IFR memanfaatkan teknologi informasi untuk mendistribusikan laporan keuangan kepada publik secara *real-time*, transparan, dan efisien (Kelton & Yang, 2008). Dalam konteks pemerintah daerah, IFR merupakan upaya modernisasi penyampaian akuntabilitas publik, di mana masyarakat dapat mengakses informasi keuangan daerah secara terbuka tanpa hambatan administratif. Teknologi ini

memungkinkan akses yang lebih luas bagi *stakeholder*, termasuk masyarakat sipil, auditor, akademisi, dan lembaga pengawas (Kurniawan & Scorpiani, 2019).

Laporan keuangan yang disajikan melalui IFR dapat mengambil berbagai bentuk dan format, tergantung pada kebutuhan dan kemampuan teknologi pemerintah daerah. Umumnya, laporan keuangan disajikan dalam bentuk *Portable Document Format* (PDF), Excel, dan HTML yang dapat diakses langsung oleh publik melalui situs resmi pemerintah daerah (Diptyana, 2019). Selain itu, beberapa daerah mulai mengadopsi XBRL (*eXtensible Business Reporting Language*) untuk meningkatkan interoperabilitas dan akurasi data keuangan (Erstiaawan, 2021)

Situs web resmi pemerintah daerah, khususnya halaman yang memuat informasi anggaran dan laporan keuangan, menjadi sarana utama IFR yang harus didesain dengan prinsip *usability* dan *accessibility* agar dapat digunakan oleh semua kalangan masyarakat (Diptyana, 2019). Pengukuran *internet financial reporting* (IFR) ini menggunakan sebuah indeks disusun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Styles & Tennyson, 2007).

Opini Audit

Opini audit merupakan pernyataan profesional auditor publik (BPK RI) mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan suatu entitas berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Dalam konteks pemerintah daerah, opini audit menjadi alat ukur objektif untuk menilai kualitas laporan keuangan dan tingkat akuntabilitas keuangan publik (Timbowo & Simanjuntak, 2025). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengklasifikasikan opini audit menjadi empat kategori, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan *Disclaimer* (tidak memberikan opini). WTP merupakan opini tertinggi dan menunjukkan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Sebaliknya, opini *Disclaimer* menunjukkan bahwa auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan layak sebagai dasar opini (Rante *et al.*, 2018). Variabel penelitian diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, yaitu pemerintah daerah dengan opini WTP diberikan nilai 1 sedangkan pemerintah daerah dengan opini selain WTP diberikan nilai 0 (Nosihana & Yaya, 2016)

Tipe Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah entitas administratif di bawah pemerintah pusat yang memiliki kewenangan otonom dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pemerintah daerah terdiri dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang memiliki struktur pemerintahan tersendiri dan dipimpin oleh kepala daerah yang dipilih secara demokratis (Lestari *et al.*, 2025). Perbedaan karakteristik pemerintah daerah otonom tingkat II (kabupaten dan kota) dapat dilihat baik dari perbedaan geografis maupun demografis. Kabupaten memiliki daerah yang relatif lebih luas dengan jumlah penduduk relatif lebih kecil dibandingkan daerah kota. Taraf hidup masyarakat dari sisi sosial, ekonomi dan pendidikan daerah kota cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah kabupaten (Yusuf & Agustang, 2020). Pengukuran variabel tipe pemerintah daerah menggunakan variabel *dummy* dimana memberikan skor 1 untuk Pemda Kota dan 0 untuk Pemda Kabupaten (Nosihana & Yaya, 2016). Data tipe daerah otonom (kabupaten/kota) diperoleh dari situs Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kemendagri.

Umur Administratif

Umur administratif pemerintah daerah merujuk pada lamanya suatu daerah otonom berdiri sejak pembentukannya secara hukum sebagai entitas administratif. Umur ini dihitung sejak diterbitkannya undang-undang atau peraturan yang mengesahkan suatu wilayah sebagai daerah otonom, seperti provinsi, kabupaten, atau kota (Rosita & Arifin, 2017). Umur

administratif sering kali dikaitkan dengan kinerja keuangan dan pemerintahan. Pemerintah daerah yang lebih lama berdiri umumnya memiliki sistem administrasi yang lebih mapan, sumber daya manusia yang lebih terlatih, serta infrastruktur birokrasi yang stabil (Sasmita, 2021). Oleh karena itu, daerah dengan umur administratif yang lebih tua cenderung memperoleh opini audit yang lebih baik dari BPK serta menunjukkan kinerja yang lebih efisien dalam pengelolaan anggaran (Daulay, 2024). Variabel umur administratif Pemda diukur dengan cara menghitung tahun berdiri Pemda (berdasarkan undang-undang pembentukan daerah otonom kabupaten/kota) hingga tahun 2024 (Rosita & Arifin, 2017). Data undang-undang pembentukan daerah otonom diperoleh dari situs Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kemendagri

Kekayaan Daerah

Kekayaan daerah merupakan tingkat kemakmuran dari suatu daerah yang membuktikan bahwasannya pemerintah daerah tersebut mampu untuk mengelola sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya. PAD mencerminkan kapasitas daerah dalam menghasilkan sumber pendapatan dari potensi lokalnya tanpa ketergantungan langsung pada transfer dari pemerintah pusat (Humaira, 2025). PAD meliputi berbagai sumber pendapatan seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain penerimaan yang sah. Meningkatnya PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal tanpa bergantung secara berlebihan pada transfer pusat (Hadijah, 2024). Pengukuran kekayaan daerah menurut Martani & Liestiani (2012), yaitu dengan cara total PAD dibagi dengan jumlah penduduk.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Opini Audit terhadap Praktik *Internet Financial Reporting*

Opini audit merupakan pernyataan profesional dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan suatu entitas berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Opini ini mencerminkan sejauh mana laporan keuangan pemerintah daerah dapat dipercaya oleh publik. Dalam konteks *internet financial reporting* (IFR), opini audit yang baik seperti Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sering dijadikan indikator atas kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah yang memperoleh opini audit WTP cenderung lebih terdorong untuk melakukan transparansi kepada masyarakat dengan mempublikasikan laporan keuangan secara digital (Putra & Lestary, 2020).

Berdasarkan teori agensi yang menjelaskan hubungan antara prinsipal (masyarakat) dan agen (pemerintah daerah), di mana terdapat potensi konflik kepentingan akibat asimetri informasi. Dalam konteks ini, opini audit menjadi mekanisme monitoring dari pihak independen (auditor) terhadap kinerja pemerintah sebagai agen. Pemerintah daerah yang memperoleh opini audit WTP dianggap memiliki tingkat kepatuhan dan akuntabilitas yang tinggi, sehingga mereka lebih terdorong untuk mengurangi informasi asimetris melalui pengungkapan IFR di *website* resmi. Hal ini sejalan dengan konsep dasar teori agensi yang menekankan pentingnya pengawasan dan pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik (Masra & Sari, 2020).

Beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian Sofyani & Dwirama (2019) serta Yuni & Sari (2022) menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap praktik IFR. Berdasarkan teori agensi dan beberapa penelitian yang mendukung, peneliti berpendapat bahwa pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP cenderung lebih untuk menampilkan informasi keuangan secara transparan melalui situs web resmi. Oleh karena itu, hipotesis pertama yang diajukan adalah:

H1: Opini audit berpengaruh positif terhadap praktik *internet financial reporting* (IFR) pada pemerintah daerah di Sumatera.

Pengaruh Tipe Pemerintah Daerah terhadap Praktik *Internet Financial Reporting*

Tipe pemerintah daerah merujuk pada bentuk wilayah administratif yang terdiri dari dua klasifikasi utama dalam struktur pemerintahan Indonesia, yaitu kabupaten dan kota. Masing-masing memiliki karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang berbeda. Kota pada umumnya memiliki tingkat urbanisasi yang lebih tinggi, akses informasi yang lebih luas, serta infrastruktur yang lebih baik dibandingkan dengan kabupaten. Kondisi ini menjadikan kota lebih mampu untuk mengadopsi dan mengimplementasikan sistem pelaporan keuangan berbasis teknologi informasi seperti IFR. Sebaliknya, kabupaten yang umumnya lebih bersifat agraris dan memiliki tantangan infrastruktur digital, mungkin menghadapi hambatan lebih besar dalam pengembangan sistem pelaporan keuangan berbasis internet (Masra & Sari, 2020).

Dalam kerangka teori agensi, kota dan kabupaten sebagai entitas pemerintah daerah bertindak sebagai agen yang memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi kepada prinsipal, yaitu masyarakat. Kota yang memiliki dinamika sosial-politik lebih kompleks biasanya menghadapi tekanan publik yang lebih kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, mereka cenderung lebih responsif terhadap tuntutan masyarakat melalui peningkatan keterbukaan informasi, termasuk dengan menyediakan laporan keuangan di situs resmi. Sebaliknya, kabupaten yang tekanan sosial-politiknya cenderung lebih lemah mungkin tidak memiliki insentif sebesar kota untuk mengembangkan IFR (Masra & Sari, 2020).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Laswad *et al.* (2005) dan Salia & Wibowo (2022) menemukan bahwa tipe pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap IFR, karena fasilitas dan akses internet di kabupaten masih terbatas dibanding kota. Dengan demikian, hipotesis kedua yang diajukan adalah:

H2: Tipe pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap praktik *internet financial reporting* (IFR) di Sumatra.

Pengaruh Umur Administratif terhadap Praktik *Internet Financial Reporting*

Umur administratif pemerintah daerah merujuk pada lamanya suatu daerah berdiri secara resmi sebagai entitas pemerintahan. Daerah yang telah lama berdiri biasanya memiliki struktur organisasi yang lebih mapan, pengalaman birokrasi yang lebih panjang, serta sistem pelaporan keuangan yang lebih stabil. Hal ini dapat memengaruhi kesiapan institusi dalam mengembangkan sistem pelaporan berbasis internet. Umur administratif dapat mencerminkan tingkat kematangan birokrasi, akumulasi pengalaman dalam pengelolaan keuangan, dan kesiapan dalam menghadapi tuntutan transparansi publik, termasuk pengungkapan informasi secara daring (Sofyani & Dwirama, 2019).

Dalam konteks teori agensi, pemerintah daerah sebagai agen dituntut untuk menyampaikan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu kepada masyarakat sebagai prinsipal. Umur administratif yang lebih lama menunjukkan adanya kemungkinan penguatan akuntabilitas melalui pembelajaran institusional dan pengalaman pengelolaan keuangan. Daerah yang telah lama berdiri memiliki potensi lebih besar untuk memahami pentingnya pengurangan asimetri informasi dan membangun kepercayaan publik. Oleh karena itu, mereka akan lebih terdorong untuk mengimplementasikan IFR sebagai sarana strategis dalam membangun reputasi institusional dan memenuhi kewajiban akuntabilitasnya (Kurniati, S. & Siddi, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian Rosita & Arifin (2017) serta Kholifah (2019) menemukan bahwa umur administratif berpengaruh positif terhadap praktik IFR, sehingga hipotesis ketiga yang diajukan adalah:

H3: Umur administratif berpengaruh positif terhadap praktik *internet financial reporting* (IFR) pada pemerintah daerah di Sumatra.

Pengaruh Kekayaan Daerah terhadap Praktik *Internet Financial Reporting*

Kekayaan daerah mencerminkan kapasitas finansial dan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kekayaan ini mencakup seluruh harta tetap, kas, dan sumber daya ekonomi lainnya yang tercantum dalam neraca keuangan pemerintah daerah. Daerah dengan kekayaan yang besar memiliki kemampuan lebih baik dalam hal pengadaan perangkat teknologi, pelatihan sumber daya manusia, dan pemeliharaan sistem informasi akuntansi. Oleh karena itu, daerah yang kaya cenderung memiliki kapasitas lebih tinggi untuk mengimplementasikan IFR secara optimal dibandingkan daerah yang kurang kaya (Diptyana, 2019).

Dalam kerangka teori agensi, kekayaan daerah menimbulkan harapan yang lebih tinggi dari masyarakat terhadap transparansi dan pengelolaan dana publik. Daerah dengan kekayaan besar diharapkan memberikan pertanggungjawaban yang memadai kepada masyarakat. Oleh sebab itu, agen akan terdorong untuk menggunakan IFR sebagai instrumen utama dalam menyampaikan informasi secara cepat dan akurat guna mengurangi informasi yang tidak simetris. IFR tidak hanya menciptakan transparansi, tetapi juga menjadi bentuk legitimasi bahwa kekayaan daerah digunakan secara bertanggung jawab (Masra & Sari, 2020).

Sejalan dengan beberapa penelitian yang dilakukan oleh Sofyani & Dwirama (2019) dan Rahman *et al.* (2013) menunjukkan bahwa kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap praktik IFR. Oleh karena itu, hipotesis keempat yang diajukan adalah:

H4: Kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap praktik *internet financial reporting* (IFR) pada pemerintah daerah di Sumatra.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kausal yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab-akibat antara dua atau lebih variabel, dengan tekanan pada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam pendekatannya, penelitian kausal sering menggunakan metode kuantitatif. Pada penelitian ini, dapat dilihat pengaruh variabel independen yaitu opini audit, tipe pemerintah daerah, umur administratif, dan kekayaan daerah terhadap variabel dependen yaitu praktik *internet financial reporting* (IFR) pemerintah daerah.

Populasi dan Sampel

Pada penelitian ini, populasi yang digunakan adalah pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di Sumatra yang berjumlah 154 pemerintah kabupaten/kota pada tahun 2024. Pada penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Berikut kriteria pengambilan sampel :

Tabel 1
Kriteria Pengambilan Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1.	Pemerintah kabupaten/kota di Sumatra	154
2.	Pemerintah pemekaran 3 tahun terakhir dan kabupaten/kota administratif	(0)
3.	Pemerintah daerah yang tidak memiliki <i>website</i> resmi go.id	(24)
Jumlah sampel yang diteliti tahun 2024		130

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data-data dalam penelitian ini diperoleh melalui *website* pemerintah daerah, (www.jdpk.kemenkeu.go.id), (www.bpk.go.id), dan *website* Kementerian Dalam Negeri RI (www.kemendagri.go.id)

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai tertulis dan digital yang tersedia, seperti laporan penelitian, arsip, jurnal ilmiah, dokumen pemerintah, dan catatan organisasi

Variabel Penelitian dan Pengukurannya

Tabel 2
Pengukuran Variabel

No	Variabel	Indikator	Skala
1	Opini Audit (X1)	Variabel <i>dummy</i> , pemda yang mendapat opini WTP diberikan nilai 1, sedangkan yang mendapat opini selain WTP diberikan nilai 0	Nominal
2	Tipe Pemerintah Daerah (X2)	Variabel <i>dummy</i> , dimana memberikan skor 1 untuk pemda kota dan 0 untuk pemda kabupaten	Nominal
3	Umur Administratif (X3)	Menghitung tahun berdiri pemda (berdasarkan Undang-undang pembentukan daerah otonom kabupaten/kota) hingga tahun 2024	Nominal
4	Kekayaan Daerah (X4)	$\text{Kekayaan Daerah} = \frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Jumlah Penduduk}}$	Rasio
5	Internet Financial Reporting (Y)	$\text{IFR} = \frac{\text{Jumlah pengungkapan masing – masing daerah}}{\text{Total seluruh pengungkapan}} \times 100 \%$	Rasio

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis

Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini, analisis statistik deskriptif dilakukan menggunakan software *EViews 12*. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data dalam penelitian, seperti rata-rata (*mean*), nilai maksimum (*maximum*), nilai minimum (*minimum*), standar deviasi (*standard deviation*), *skewness*, dan median.

Tabel 3
Hasil Statistik Deskriptif

	IFR	OP	TYPE	AGE	WEALTH
Mean	0.463077	0.923077	0.207692	43.07692	573900.9
Median	0.400000	1.000000	0.000000	26.50000	463669.0
Maximum	1.000000	1.000000	1.000000	68.00000	2900465.
Minimum	0.100000	0.000000	0.000000	11.00000	120557.0
Std. Dev.	0.213911	0.267500	0.407225	22.91495	444241.2
Skewness	0.858951	-3.175426	1.441163	0.064537	2.703453
Kurtosis	2.664868	11.08333	3.076951	1.085299	12.69167
Jarque-Bera Probability	16.59395	572.3987	45.03267	19.94817	667.1332
	0.000249	0.000000	0.000000	0.000047	0.000000
Sum	60.20000	120.0000	27.00000	5600.000	74607120
Sum Sq. Dev.	5.902769	9.230769	21.39231	67737.23	2.55E+13
Observations	130	130	130	130	130

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan nilai variabel *internet financial reporting*

(IFR) memiliki nilai rata-rata IFR sebesar 0,46 dan median 0,40, menunjukkan bahwa tingkat praktik IFR di antara pemerintah daerah masih relatif sedang, dengan beberapa daerah yang memiliki praktik cukup tinggi. Nilai minimum adalah 0,1 dan maksimum 1. Penyebaran data tergolong moderat dengan standar deviasi sebesar 0,21. *Skewness* positif (0,85) mengindikasikan bahwa sebagian besar pemerintah daerah berada di tingkat IFR yang lebih rendah, dengan sedikit yang sangat tinggi. Kurtosis sebesar 2,66 menunjukkan bentuk distribusi yang mendekati normal.

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan nilai variabel opini audit (OP) memiliki nilai rata-rata 0,92, dengan nilai maksimum 1 dan minimum 0, menunjukkan bahwa sebagian besar daerah memperoleh opini audit WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Median bernilai 1, menunjukkan lebih dari separuh pemerintah daerah mendapat opini tertinggi. *Skewness* negatif (-3,19) dan kurtosis sangat tinggi (11,08) menunjukkan distribusi data sangat menceng ke kiri dan memiliki puncak yang tajam.

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan nilai variabel tipe pemda (TYPE) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,20 menunjukkan bahwa sebagian besar sampel adalah kabupaten. Nilai *skewness* sebesar 1,44 dan kurtosis 3,07 menunjukkan distribusi condong ke kanan dan agak leptokurtik.

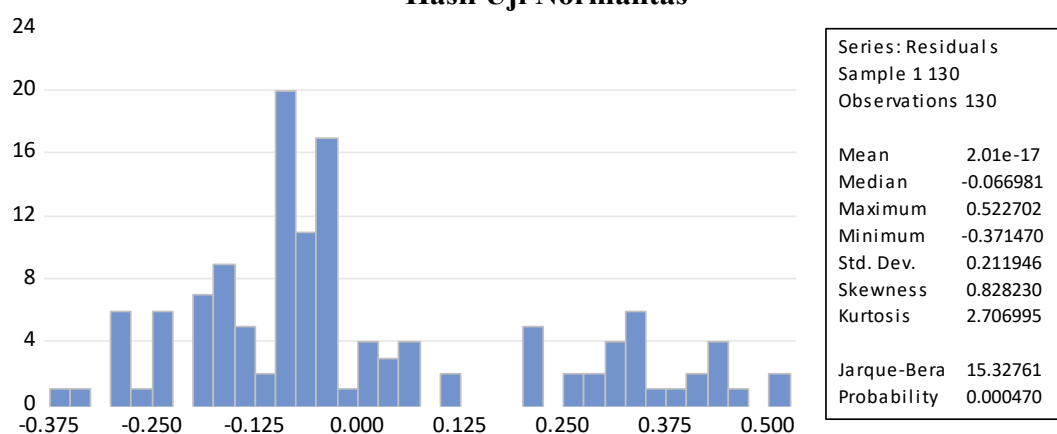
Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan nilai variabel umur administratif (AGE) memiliki nilai rata-rata sebesar 43,07 tahun, dengan nilai maksimum 68 tahun dan minimum 11 tahun, menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam usia pemerintah daerah. Standar deviasi sebesar 22,91 menunjukkan keragaman tinggi. *Skewness* positif ringan (0,06) dan kurtosis 1,08 mengindikasikan distribusi agak mendekati normal.

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan nilai variabel kekayaan daerah (WEALTH) memiliki nilai rata-rata sebesar 573,900. dengan standar deviasi sangat tinggi 444,241, mengindikasikan adanya disparitas besar antar daerah dalam hal kekayaan. Nilai minimum sekitar 120,557, sementara maksimum mencapai 2,900,465, menunjukkan ketimpangan fiskal yang besar. *Skewness* lumayan tinggi (2,70) dan kurtosis 12,69 mengindikasikan distribusi menceng ke kanan.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas



Berdasarkan hasil uji normalitas yang dilakukan dengan menggunakan *Eviews12*, dapat disimpulkan bahwa residual dari model yang dianalisis tidak mengikuti distribusi normal. Hal ini terlihat dari nilai *skewness* sebesar 0.82 yang menunjukkan adanya kemencengan ke kanan (positif), dan kurtosis sebesar 2.70 yang sedikit lebih rendah dari distribusi normal standar (kurtosis = 3). Yang paling menonjol adalah hasil uji Jarque-Bera sebesar 15.32 dengan probabilitas 0.000470, yang jauh di bawah tingkat signifikansi 0.05, sehingga

hipotesis nol (data berdistribusi normal) ditolak. Histogram juga menunjukkan distribusi yang tidak simetris, memperkuat kesimpulan bahwa residual tidak normal.

Akan tetapi, menurut Gujarati & Porter (2013), asumsi normalitas tidak menjadi hal yang krusial ketika ukuran sampel cukup besar. Dalam kondisi tersebut, dapat diterapkan asumsi Central Limit Theorem, yang menyatakan bahwa jika jumlah sampel melebihi 30, maka distribusi data dapat dianggap mendekati normal. Oleh karena itu, penelitian ini tetap dapat dilanjutkan menggunakan asumsi tersebut meskipun distribusi data tidak sepenuhnya normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	<i>Uncentered</i> VIF	<i>Centered</i> VIF
C	19.17114	NA
OP	13.14117	1.010859
TYPE	1.514837	1.200217
AGE	4.866934	1.067012
WEALTH	3.056135	1.139558

Berdasarkan tabel di atas yang dilakukan dengan menggunakan *Eviews12*, menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai VIF terpusat (*Centered* VIF) di bawah angka kritis 10, bahkan sebagian besar jauh di bawah 5. Nilai VIF untuk variabel OP (1.01), TYPE (1.20), AGE (1.06), dan WEALTH (1.13) mengindikasikan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas yang signifikan di antara variabel-variabel independen dalam model regresi. Sementara nilai *Uncentered* VIF yang tinggi (misalnya C = 19.17 dan OP = 13.14) tidak menjadi perhatian utama karena yang relevan untuk mendeteksi multikolinearitas adalah *Centered* VIF

Uji Heterokedastisitas

Tabel 6
Hasil Uji Heterokedastisitas

Dependent Variable: ABS Resid		
Variabel	t-Statistic	Prob.
C	3.886433	0
OP	0.192589	0.8476
TYPE	1.034425	0.3029
AGE	-2.081877	0.2790
WEALTH	0.713806	0.4767

Berdasarkan tabel uji heteroskedastisitas yang dilakukan dengan menggunakan *Eviews12*, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Hal ini terlihat dari nilai **probabilitas (p-value)** untuk seluruh variabel independen (**OP = 0.84**, **TYPE = 0.30**, **AGE = 0.27**, dan **WEALTH = 0.47**) yang semuanya lebih besar dari tingkat signifikansi umum ($\alpha = 0.05$). Artinya, tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel-variabel independen dengan nilai residual yang diestimasi, sehingga varians error dapat dianggap homogen (homoskedastik)

Regresi Linear Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.412463	0.082683	4.988475	0.0000
OP	0.072964	0.071251	1.024040	0.3078
TYPE	0.015257	0.050999	0.299165	0.7653
AGE	-0.000818	0.000855	-0.957113	0.3404
WEALTH	2.67E-08	4.56E-08	0.586261	0.0363
R-squared	0.018290	Mean dependent var		0.464427
Adjusted R-squared	0.053125	S.D. dependent var		0.218889
S.E. of regression	0.215310	Akaike info criterion		-0.674810
Sum squared resid	5.794808	Schwarz criterion		-0.868970
Log likelihood	17.72518	Hannan-Quinn criter.		-0.735818
F-statistic	0.582210	Durbin-Watson stat		2.944614
Prob(F-statistic)	0.038066			

Berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$\text{IFR} = 0.41 + 0.07 \cdot \text{OP} + 0.01 \cdot \text{TYPE} - 0.0008 \cdot \text{AGE} + 2.67 \cdot \text{WEALTH} + e$$

Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan Tabel 7, diperoleh nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0.053, yang berarti bahwa hanya sekitar 5,3% variasi dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi dalam variabel independen dimasukkan dalam model regresi. Dengan demikian, sebesar 94,7% variasi variabel dependen disebabkan oleh faktor-faktor lain di luar model, yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

Uji F

Berdasarkan Tabel 7, diketahui bahwa nilai Prob (F-statistic) < 0,05 yaitu sebesar 0,03, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan berpengaruh signifikan secara simultan. Dengan demikian, secara keseluruhan variabel-variabel independen yang digunakan dalam model memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen

Uji t

Variabel Opini Audit (OP) memiliki koefisien regresi sebesar 0.07 dengan nilai *p-value* sebesar 0,30. Koefisien positif ini menunjukkan adanya hubungan positif antara opini audit dan praktik *internet financial reporting* (IFR). Namun, karena *p-value* lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, maka hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel Opini Audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *internet financial reporting* (IFR), sehingga **hipotesis pertama (H1) ditolak**

Variabel Tipe Pemerintah Daerah (TYPE) memiliki koefisien regresi sebesar 0.01 dengan nilai *p-value* sebesar 0,76. Koefisien positif ini menunjukkan adanya hubungan positif antara tipe pemerintah daerah dan *internet financial reporting* (IFR). Namun, karena *p-value* lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, maka hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel tipe pemerintah daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *internet financial reporting* (IFR), sehingga **hipotesis kedua (H2) ditolak**.

Variabel Umur Administratif (AGE) memiliki koefisien regresi sebesar -0.0008 dengan nilai *p-value* sebesar 0,34. Koefisien negatif ini menunjukkan adanya hubungan negatif antara

umur administratif dan *internet financial reporting* (IFR). Namun, karena *p-value* lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, maka hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel umur administratif tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *internet financial reporting* (IFR), sehingga **hipotesis ketiga (H3) ditolak**.

Variabel Kekayaan Daerah (WEALTH) memiliki koefisien regresi sebesar 2.67 dengan nilai *p-value* sebesar 0,03. Koefisien positif ini menunjukkan adanya hubungan positif antara kekayaan daerah dan *internet financial reporting* (IFR). Nilai *p-value* lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, maka hubungan tersebut signifikan secara statistik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel kekayaan daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap *internet financial reporting* (IFR), sehingga **hipotesis keempat (H4) diterima**.

Pembahasan

Pengaruh Opini Audit terhadap Praktik *Internet Financial Reporting*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *internet financial reporting* (IFR). Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa opini audit WTP tidak cukup menjadi pendorong kuat bagi pemerintah daerah untuk menerapkan IFR. Hal ini disebabkan karena opini audit lebih menekankan pada kepatuhan administratif dan teknis, bukan pada keterbukaan informasi publik. Daerah bisa saja memperoleh WTP karena memenuhi standar akuntansi dan prosedur audit, tetapi tidak memiliki kapasitas, infrastruktur, atau dorongan internal untuk mempublikasikan laporan keuangan secara daring. Dalam konteks ini, opini audit bukan merupakan insentif langsung bagi penerapan IFR (Kholifah, 2019). Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Nosihana & Yaya (2016) yang menunjukkan bahwa opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik *internet financial reporting* (IFR). Namun, penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Sofyani & Dwirama (2019) dan Yuni & Sari (2022) yang menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap praktik IFR.

Pengaruh Tipe Pemerintah Daerah terhadap Praktik *Internet Financial Reporting*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tipe pemerintah daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *internet financial reporting* (IFR). Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara empiris, tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa perbedaan tipe pemerintah daerah (kota atau kabupaten) berkontribusi signifikan terhadap tingkat penerapan IFR. Hasil ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya seperti Kholifah (2019) yang menyatakan bahwa tipe pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat adopsi IFR. Namun, penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Laswad *et al.* (2005) dan Salia & Wibowo (2022) menemukan bahwa tipe pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap IFR, karena fasilitas dan akses internet di kabupaten masih terbatas dibanding kota.

Pengaruh Umur Administratif terhadap Praktik *Internet Financial Reporting*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur administratif tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *internet financial reporting* (IFR). Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa umur administratif bukan merupakan faktor penentu dalam penerapan IFR. Meskipun daerah yang lebih tua diasumsikan memiliki kapasitas yang lebih baik, kenyataannya tidak semua pemerintah daerah dengan umur administratif yang panjang memiliki kemauan atau kemampuan untuk menerapkan IFR secara optimal. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Sofyani & Dwirama (2019) yang menyatakan bahwa faktor umur administratif tidak memiliki hubungan signifikan terhadap penerapan IFR di pemerintah daerah. Namun, temuan dalam penelitian ini bertolak belakang

dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rosita & Arifin (2017) dan Kholifah (2019), yang menunjukkan bahwa umur administratif memiliki pengaruh positif terhadap praktik *internet financial reporting* (IFR).

Pengaruh Kekayaan Daerah terhadap Praktik *Internet Financial Reporting*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekayaan daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap *internet financial reporting* (IFR). Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kekayaan suatu daerah berperan dalam mendorong adopsi IFR. Daerah yang memiliki PAD per kapita yang tinggi cenderung memiliki kemampuan finansial yang lebih besar untuk membangun infrastruktur teknologi, serta mendanai pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur dalam mengelola sistem pelaporan keuangan berbasis internet. Selain itu, kekayaan daerah juga menjadi simbol kapasitas kelembagaan, yang dapat mencerminkan kesiapan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk dalam hal transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan (Rahman *et al.*, 2013). Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sofyani & Dwirama (2019) yang menyatakan bahwa kapasitas fiskal menjadi salah satu determinan utama dalam penerapan IFR di pemerintah daerah. Demikian pula, Rahman *et al.* (2013) menemukan bahwa daerah dengan kapasitas fiskal tinggi memiliki kemungkinan lebih besar untuk menerapkan IFR secara lebih aktif sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

1. Opini Audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap praktik *internet financial reporting* (IFR) dalam *website* pemerintah daerah kabupaten/kota tahun anggaran 2024
2. Tipe pemerintah daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap praktik *internet financial reporting* (IFR) dalam *website* pemerintah daerah kabupaten/kota tahun anggaran 2024
3. Umur administratif tidak berpengaruh secara signifikan terhadap praktik *internet financial reporting* (IFR) dalam *website* pemerintah daerah kabupaten/kota tahun anggaran 2024
4. Kekayaan daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap praktik *internet financial reporting* (IFR) dalam *website* pemerintah daerah kabupaten/kota tahun anggaran 2024

Keterbatasan

1. Pada penelitian ini, data total pendapatan asli daerah (PAD) didapat dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sehingga data total pendapatan asli daerah (PAD) bukan didapat langsung dari *website* pemda kabupaten/kota, hal ini dikarenakan Pemda yang seharusnya menjadi sampel penelitian tidak memberikan datanya secara lengkap
2. Pada penelitian ini hanya memiliki nilai *Adjusted R* sebesar 5,3%. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini yang memiliki pengaruh besar terhadap praktik *internet financial reporting* (IFR).

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

1. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk membangun komunikasi yang lebih intensif dengan pemerintah daerah guna memperoleh data langsung, baik melalui permohonan informasi resmi, kerja sama kelembagaan, atau wawancara mendalam dengan pihak terkait. Hal ini dapat meningkatkan akurasi dan kedalaman analisis.
2. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan agar menambah variabel lain yang dianggap mampu memengaruhi praktik *internet financial reporting* (IFR) dalam *website* pemerintah daerah kabupaten/kota seperti kompetisi politik, visibilitas media, alokasi belanja daerah, dan tingkat penetrasi internet

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony Putra, A. A., & Syofyan, E. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah, Pendapatan Per Kapita Dan Leverage Terhadap Keteraksesan Internet Financial Report Oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2020–2034. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.193>
- Budiman, A.P., & Agustin, H. (2023). Determinan Praktik *Internet financial reporting* (IFR) pada Website Pemerintah Daerah Sumatera Barat. *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, 1(1), 49–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jnka.v1i1.4> This
- Daulay, A. R. (2024). *Inovasi aplikasi sibisa dalam pelayanan kartu keluarga dengan aplikasi sibisa di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota medan provinsi sumatera utara* [Insitut Pemerintah Dalam Negeri]. <http://eprints.ipdn.ac.id/17696/>
- Diptyana, P. (2019). Pengaruh Faktor Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas *Internet financial reporting*. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 7(3), 513–530. <https://doi.org/10.17509/jrak.v7i3.17830>
- Erstiawan, M. S. (2021). Kepatuhan Emiten dalam Taksnomi Extensible Business Reporting (XBRL). *CAPITAL: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 5(1), 71. <https://doi.org/10.25273/capital.v5i1.10308>
- Hadijah, U. (2024). *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), kekayaan daerah, dan belanja modal dalam meningkatkan kemandirian keuangan pemerintah Kota Metro* [Universitas Muhammadiyah Metro]. [http://eprints.ummetro.ac.id/3242/4/BAB III.pdf](http://eprints.ummetro.ac.id/3242/4/BAB%III.pdf)
- Haluti, S., Andrea, R., Ridwan, & Yamin, N. Y. (2024). Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI Pada Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali. *Jurnal Ilmiah Manajemen EMOR*, 8(2), 137–147. <https://doi.org/10.31850/economos.v3i1.610>
- Hehanussa, S. J. (2015). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon Salomi*. 2, 82–90.
- Humaira, B. P. (2025). *Pengaruh Smart Economy terhadap Pendapatan Asli Daerah di Indonesia* [Universitas Andalas]. [http://scholar.unand.ac.id/496747/7/BAB I.pdf](http://scholar.unand.ac.id/496747/7/BAB%I.pdf)
- Jensen, M. ., & Meckling, W. . (1976). Agency Costs and the Theory of the Firm. *Financial Review*, 21(3), 95–95. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6288.1986.tb00759.x>
- Kelton, A. S., & Yang, Y. wen. (2008). The impact of corporate governance on *Internet financial reporting*. *Journal of Accounting and Public Policy*, 27(1), 62–87. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2007.11.001>
- Kholifah, D. W. (2019). Determinan Praktik *Internet financial reporting* (IFR) dalam Website Pemerintah Daerah. In *Universitas Islam Indonesia Repository*. Universitas Islam Indonesia.
- Kurniati, S. & Siddi, P. (2020). Pengaruh Kekayaan Daerah, Jenis Pemerintahan, Dan Kualitas Audit Terhadap Pengungkapan Internet-Based Financial Reporting. *INVENTORY: Jurnal Akuntansi*, 4(2), 166–174. <https://core.ac.uk/download/pdf/322528029.pdf>
- Kurniawan, C. H., & Scorpianti, L. N. K. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketersediaan Dan Keteraksesan *Internet financial reporting* oleh Pemerintah Daerah di Indonesia. *Modus*, 31(2), 184–206.
- Laswad, F., Fisher, R., & Oyelere, P. (2005). Determinants of voluntary *Internet financial reporting* by local government authorities. *Journal of Accounting and Public Policy*, 24(2), 101–121. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2004.12.006>
- Lestari, R., Abdurrah, U., & Afandi, S. A. (2025). *Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Kesetaraan Gender Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Abstrak*. 8(1)(February), 264–277. <https://doi.org/10.36341/jdp.v8i01.5621>
- Martani, D., & Liestiani, A. (2012). *Disclosure of Local Government Financial Statement in Indonesia*.
- Masra, E. A., & Sari, V. F. (2020). Faktor Yang Mempengaruhi *Internet financial reporting*

- (Ifr) Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(2), 2757–2771. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i2.246>
- Mokhtar, E. S. (2017). *Internet financial reporting* determinants: a meta-analytic review. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 15(1), 116–154. <https://doi.org/10.1108/JFRA-07-2016-0061>
- Nosihana, A., & Yaya, R. (2016). *Internet financial reporting dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Indonesia*. 3(2), 95.
- Putra, Y. P., & Lestary, E. (2020). *Pengaruh Kompetensi Politik, Ipm, Leverage Dan Opini Audit Terhadap Ketersediaan Dan Keteraksesan Internet financial reporting Pemerintah Daerah Di Indonesia*.
- Rahman, A., Sutaryo, & Budiatmanto, A. (2013). Determinan Internet Financial Local Government Reporting di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XVI, September 2013*, 1299–1323.
- Rante, I., Salle, A., & Marlissa, E. R. (2018). Analisis Terhadap Pemberian Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang. *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)*, 3(2), 1–12. <https://doi.org/10.52062/keuda.v3i2.705>
- Rosita, L. R. A., & Arifin, J. (2017). Determinan Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan Dalam Website Pemerintah Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi XX*.
- Salia, F. N., & Wibowo, S. (2022). Ada Apa Dengan Faktor Kepemimpinan Dalam Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Eks Karesidenan Surakarta? *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 8(1), 63–89. <https://doi.org/10.34204/jiafe.v8i1.4893>
- Salle, A. (2017). Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)*, 1(1), 1–19. <https://doi.org/10.52062/keuda.v1i1.740>
- Sasmita, R. P. H. (2021). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Opini Audit Bpk Terhadap Understandability Dalam Kualitas Laporan Keuangan. *Modus*, 33(1), 98–119. <https://doi.org/10.24002/modus.v33i1.4171>
- Sofyani, H., & Dwirama, V. (2019). Determinan Praktik Internet Reporting oleh Pemerintah Daerah di Indonesia. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 17(2), 158–168. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v17i2.5855>
- Sonbay, Y. Y. (2022). Kritik Terhadap Pemberlakuan Teori Agensi Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Suku Boti. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 6(2). <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i2.5176>
- Styles, A. K., & Tennyson, M. (2007). Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management Article information. *Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 19(1), 56–92. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-19-01-2007-B003>
- Sutaryo, S., & Tri Amanu, K. (2020). Transparansi Informasi Pemerintah Daerah Melalui Website: Faktor Politik Atau Keuangan? *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(1), 43–60. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i1.4619>
- Timbowo, J. M., & Simanjuntak, T. H. (2025). *Strategi Badan Keuangan Dan Aset Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan* [Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)]. <http://eprints.ipdn.ac.id/24220/>
- Yuni, Y., & Sari, V. F. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan dalam Website Pemerintah Daerah: Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(3), 449–464. <https://doi.org/10.24036/jea.v4i3.466>
- Yusuf, M., & Agustang, A. (2020). Dinamika perubahan sosial ekonomi pada masyarakat Kindang Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Sosialisasi*, 7 (November), 31–37. <https://www.academia.edu/download/74083326/9141.pdf>